KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) DALAM MENINGKATKAN PERAN ORGANISASI MASYARAKAT DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH

Edhita Dorkas Imel Wakum
NPP. 33.1101
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: edhitawakum09@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Baharuddin Thahir, S.Sos, M.Si
Email: baharuddin.thahir@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The performance of Kesbangpol in fostering community organizations (Ormas) in Mimika Regency has not been optimal, evidenced by a gap between 161 recorded Ormas and only 52 officially registered ones. This gap aligns with findings from Nugrahinni & Nurcahyanto (2023) on limited HR capacity and service quality in Kesbangpol Semarang, and extends them to a more complex regional context. Unlike Gumelar (2023) who found Kesbangpol Sragen functioning adequately as a facilitator, and Mirwanto (2022) who demonstrated positive HR effectiveness in an urban Javanese context, this study reveals that geographic complexity, multiculturalism, and Ormas dualism in Mimika produce significantly different outcomes.****Purpose:*** *This study aims to describe the performance of Kesbangpol in enhancing the role of Ormas in Mimika Regency, Central Papua Province.****Method:*** *This qualitative descriptive study collected data through in-depth interviews with 5 purposively selected key informants, observation, and documentation, analyzed using Miles & Huberman's interactive model. Performance is assessed using Dwiyanto's (2021) five indicators: productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability.****Result:*** *Kesbangpol's performance has been implemented but is suboptimal: productivity is constrained by limited human resources and socialization; service quality shows complaints on slow verification; responsiveness is adequate centrally but weak in the field; responsibility is maintained procedurally; and accountability focuses on financial rather than substantive reporting. Key inhibitors include limited human resources, inadequate facilities, weak coordination, and low Ormas awareness of legal registration.****Conclusion:*** *Kesbangpol requires significant improvement in human resource capacity, digital information systems, and multi-stakeholder collaboration to strengthen Ormas as strategic development partners.*

Keywords: Coaching; Community Organizations; Kesbangpol; Performance

ABSTRAK

Permasalahan (Research Gap): Kinerja Kesbangpol dalam pembinaan organisasi masyarakat (Ormas) di Kabupaten Mimika belum optimal, terbukti dari kesenjangan antara 161 ormas yang terdata dengan hanya 52 yang terdaftar resmi. Kesenjangan ini sejalan dengan temuan Nugrahinni & Nurcahyanto (2023) tentang keterbatasan SDM dan kualitas layanan Kesbangpol Semarang, namun berbeda dengan Gumelar (2023) yang menemukan Kesbangpol Sragen cukup efektif sebagai fasilitator, dan Mirwanto (2022) yang menunjukkan efektivitas SDM berpengaruh positif dalam konteks perkotaan Jawa. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa konteks geografis, multikultural, dan fenomena dualisme ormas di Mimika secara signifikan membatasi kinerja kelembagaan.**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kinerja Kesbangpol dalam meningkatkan peran Ormas di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.**Metode:** Penelitian deskriptif kualitatif ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam terhadap 5 informan kunci yang dipilih secara purposive, observasi, dan dokumentasi, dianalisis dengan model interaktif Miles & Huberman. Kinerja dianalisis menggunakan lima indikator Dwiyanto (2021).**Hasil/Temuan:** Kinerja Kesbangpol telah dilaksanakan namun belum optimal pada semua dimensi: produktivitas terkendala keterbatasan SDM dan sosialisasi; kualitas layanan mendapat keluhan lambatnya verifikasi; responsivitas baik di kantor namun lemah di lapangan; responsibilitas terjaga secara prosedural; dan akuntabilitas lebih bersifat keuangan daripada substantif. Hambatan utama meliputi keterbatasan SDM, sarana prasarana, koordinasi lemah, dan rendahnya kesadaran legalitas ormas.**Kesimpulan:** Kesbangpol memerlukan peningkatan signifikan dalam kapasitas SDM, sistem informasi digital, dan kolaborasi multipihak guna memperkuat peran ormas sebagai mitra strategis pembangunan daerah.

Kata kunci : Kesbangpol; Kinerja; Organisasi Masyarakat; Pembinaan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi masyarakat (ormas) merupakan elemen fundamental dalam dinamika pembangunan bangsa. Dalam konteks demokrasi modern, ormas tidak sekadar wadah penyalur aspirasi warga, tetapi juga aktor strategis yang menjembatani relasi antara pemerintah dan masyarakat. Keberadaan ormas yang sehat, tertib hukum, dan berdaya secara kelembagaan menjadi prasyarat terciptanya tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif. Kondisi ini semakin relevan di daerah-daerah yang memiliki kompleksitas sosial, budaya, dan geografis tinggi, di mana kehadiran ormas menjadi instrumen penting pemeliharaan harmoni sosial sekaligus penggerak pembangunan dari bawah.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 5 Maret 2024, tercatat 554.692 ormas terdaftar di Indonesia, di mana 1.530 memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan 553.162 berbadan hukum (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013). Besarnya jumlah ormas tersebut mencerminkan vitalitas masyarakat sipil di Indonesia. Namun di sisi lain, angka ini juga menghadirkan tantangan bagi lembaga pemerintah yang bertugas membina dan mengawasi ormas, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan.

Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah dengan karakteristik yang khas: keberagaman 34 suku, kondisi geografis yang kompleks dengan wilayah pegunungan dan dataran rendah yang sulit dijangkau, serta dinamika sosial yang dipengaruhi oleh kehadiran industri berskala besar. Dalam konteks ini, peran ormas sangat vital tidak hanya sebagai representasi identitas komunitas, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan sosial dan pengawal pembangunan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai lembaga pemerintah daerah memiliki tugas pokok membina dan memberdayakan ormas (Peraturan Bupati Mimika No. 33/2015). Namun kenyataan di lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan: dari 161 ormas yang terdata di Kesbangpol Mimika, hanya 52 yang terdaftar resmi melalui aplikasi Meno Sidak Kanda (Evita, 2025). Kesenjangan ini bukan semata persoalan administratif, melainkan cerminan dari belum optimalnya fungsi pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi.

1.2. Kesenjangan Masalah (Research Gap)

Kajian-kajian sebelumnya tentang Kesbangpol telah menghasilkan temuan yang beragam. Gumelar (2023) menemukan Kesbangpol Sragen menjalankan fungsi fasilitator dengan cukup efektif meski menghadapi kendala ormas tidak terdaftar, sementara Nugrahinni & Nurcahyanto (2023) menemukan kinerja Kesbangpol Semarang belum optimal pada aspek SDM dan kualitas layanan. Mirwanto (2022) menunjukkan bahwa efektivitas SDM berpengaruh langsung dan positif terhadap kinerja Kesbangpol dalam konteks perkotaan Jawa, sedangkan Efyanti (2018) merekomendasikan penguatan administrasi dan koordinasi di Kesbangpol Kota Sungai Penuh.

Persamaan dari seluruh kajian tersebut adalah fokus pada keterbatasan SDM sebagai hambatan utama. Perbedaannya terletak pada tingkat keparahan dan konteks lokalnya: studi di Jawa cenderung menemukan kendala yang lebih dapat diatasi melalui penguatan prosedural, sedangkan daerah-daerah dengan kompleksitas geografis dan sosial-budaya yang lebih tinggi menghadapi hambatan yang lebih struktural. Penelitian di wilayah Papua dengan karakteristik multikultur 34 suku, geografis terpencil, dan fenomena dualisme ormas seperti Kabupaten Mimika masih sangat terbatas. Studi internasional oleh Brinkerhoff & Brinkerhoff (2011) menegaskan bahwa efektivitas lembaga pembina di negara berkembang sangat dipengaruhi konteks lokal yang spesifik, sebuah proposisi yang belum diuji secara empiris pada konteks Papua Tengah.

Posisi penelitian ini adalah mengisi celah tersebut dengan mengkaji kinerja Kesbangpol pada konteks daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang memiliki kompleksitas unik, serta menguji sejauh mana teori kinerja Dwiyanto (2021) yang dikembangkan dalam konteks perkotaan dapat menjelaskan fenomena kelembagaan di daerah dengan karakteristik geografis-sosiologis yang berbeda.

1.3. Urgensi Penelitian

Tanpa gambaran empiris yang kuat, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan basis analitis untuk merancang program pembinaan ormas yang tepat sasaran. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi berbasis bukti untuk memperkuat peran ormas sebagai mitra strategis pembangunan di Kabupaten Mimika.

1.4. Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan tabel sintesis penelitian terdahulu yang relevan:

Tabel 1. Sintesis Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti/Tahun	Fokus/Variabel	Metode	Temuan Utama	Persamaan & Perbedaan
1	Gumelar (2023)	Peran Kesbangpol dalam pembinaan ormas, Kab. Sragen	Kualitatif deskriptif	Kesbangpol Sragen cukup efektif sebagai fasilitator meski ada ormas tidak terdaftar	Sama: variabel pembinaan ormas. Beda: konteks Sragen urban vs Mimika daerah 3T multikultur
2	Nugrahinni & Nurcahyanto (2023)	Kinerja organisasi Kesbangpol Kota Semarang	Kualitatif deskriptif	Kinerja belum optimal pada SDM dan kualitas layanan	Sama: indikator kinerja. Beda: Semarang kota besar vs Mimika daerah terpencil
3	Mirwanto (2022)	Efektivitas kinerja pegawai Kesbangpol	Kuantitatif	Efektivitas SDM berpengaruh positif dan langsung pada kinerja Kesbangpol	Sama: variabel SDM dan kinerja. Beda: konteks urban Jawa vs Mimika
4	Efyanti (2018)	Peran Kesbangpol Linmas Kota Sungai Penuh dalam pembinaan ormas	Kualitatif	Merekomendasikan penguatan administrasi dan koordinasi	Sama: fokus pembinaan ormas. Beda: skala daerah dan dimensi adat Mimika
5	Noor Ihsan (2022)	Pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan ormas terhadap manajemen pembinaan ormas di Kesbangpol Kabupaten Garut	Kuantitatif	Pelaksanaan kebijakan pembinaan ormas berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pembinaan ormas dan efektivitas program pembinaan	Sama: fokus pada pembinaan ormas oleh Kesbangpol. Beda: penelitian ini menganalisis kinerja kelembagaan Kesbangpol Mimika secara kualitatif dalam konteks

	daerah 3T dan multikultural.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghasilkan kebaruan dalam tiga dimensi:

Pertama, kebaruan konseptual: penelitian ini mengusulkan bahwa model kinerja kelembagaan Dwiyanto (2021) yang dikembangkan dalam konteks perkotaan perlu dilengkapi variabel konteks geografis-sosiologis untuk menghasilkan prediksi yang akurat pada daerah 3T. Temuan ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori kinerja organisasi publik yang lebih kontekstualistis.

Kedua, kebaruan temuan: penelitian ini menemukan fenomena dualisme kepengurusan ormas sebagai faktor penghambat unik yang tidak ditemukan dalam kajian Kesbangpol di Jawa. Fenomena ini berpotensi menjadi penghancur modal sosial (Putnam, 2000), mengusulkan dimensi baru: kelembagaan ormas yang fungsional sebagai prasyarat akumulasi modal sosial, bukan sekadar keberadaannya secara formal.

Ketiga, kebaruan empiris: penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa digitalisasi layanan melalui e-government (aplikasi Meno Sidak Kanda) tidak secara otomatis meningkatkan akuntabilitas substantif kepada masyarakat, mengkonfirmasi sekaligus memperluas argumen Linders (2012) tentang syarat transformasi dari e-government menuju we-government dalam konteks daerah dengan digital divide yang signifikan.

1.6. Tujuan

Mendeskripsikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam meningkatkan peran organisasi masyarakat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali data secara kontekstual dan menyeluruh (Sugiyono, 2023:9; Moleong, 2017:6). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Lima informan dipilih secara purposive sampling: (1) Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai informan kunci (key informant); (2) Staf Organisasi Kemasyarakatan; serta (3) tiga ketua ormas (Ikatan Minang, Lembaga Adat Amungme-Kamoro, dan Binfora). Pemilihan informan kunci didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki akses informasi langsung, kewenangan pengambilan keputusan, serta pemahaman mendalam tentang kebijakan dan praktik pembinaan ormas di Kesbangpol Kabupaten Mimika. Kecukupan jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip data saturation, yaitu ketika penambahan informan baru tidak lagi menghasilkan informasi substansial yang berbeda dari data yang telah diperoleh sebelumnya.

Penelitian dilaksanakan selama periode magang 5-26 Januari 2026 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Analisis menggunakan

model interaktif Miles & Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2023:130). Kinerja dianalisis berdasarkan teori Dwiyanto (2021:98): produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Tabel 2. Operasionalisasi Konsep Penelitian

NO	VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR
1.	Kinerja Kesbangpol (Dwiyanto, 2021)	Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas	Efektivitas, Efisiensi, Hasil Kerja; Pemberian, Mutu, Kepuasan Layanan; Kemampuan Organisasi, Partisipasi Masyarakat; Ketepatan Kebijakan, Kepatuhan SOP; Pertanggungjawaban, Kepekaan Publik
2.	Faktor Kendala	Penghambat	SDM, Fasilitas, Koordinasi, Kesadaran Ormas
3.	Upaya Kesbangpol	Internal & Eksternal	Peningkatan SDM, Sosialisasi, Kolaborasi

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kinerja Kesbangpol Kabupaten Mimika menggunakan lima dimensi teori kinerja Dwiyanto (2021:98). Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan 5 informan pada Januari 2026 di Kantor Kesbangpol dan sekretariat ormas Kabupaten Mimika.

Tabel 3. Masalah Pokok dan Akar Masalah Kesbangpol Kabupaten Mimika

MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
SEBAGIAN BESAR ORMAS BELUM TERDATA DAN TERVERIFIKASI SECARA DIGITAL.	Belum ada sistem informasi dan basis data ormas digital yang terpadu dan merata.
AKTIVITAS ORMAS DALAM PEMBINAAN SOSIAL-POLITIK MASIH RENDAH.	Kapasitas kelembagaan ormas terbatas: SDM dan manajemen organisasi lemah.
161 ORMAS TERCATAT, HANYA 52 TERDAFTAR RESMI (EVITA, 2025).	Rendahnya kemandirian finansial dan kesadaran legalitas organisasi.
KOORDINASI LEMAH ANTARLEMBAGA PEMBINA.	Keterbatasan anggaran dan SDM Kesbangpol dalam menjangkau seluruh ormas.

Sumber: Data sekunder Kesbangpol Kabupaten Mimika, diolah peneliti 2026

3.1. Produktivitas

Produktivitas diukur dari efektivitas, efisiensi, dan hasil kerja (Dwiyanto, 2021:48-49). Dari sisi efektivitas, aparatur Kesbangpol Mimika telah menjalankan mekanisme kerja sesuai prosedur yang ditetapkan dengan koordinasi yang memadai antarbidang. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal, sistem tata kerja organisasi berjalan dengan tertib. Namun demikian, efektivitas prosedural tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan capaian substantif yang optimal terhadap tujuan organisasi sebagaimana ditegaskan oleh Hood (1991) dalam paradigma new public management.

Dari sisi efisiensi, kondisinya dinilai rendah. Minimnya kegiatan sosialisasi, lemahnya komunikasi terstruktur, dan pembinaan yang belum tepat sasaran menjadi hambatan nyata. Kabid Ketahanan Ekonomi menyatakan secara terbuka: "Pembinaan ormas belum efisien terutama karena kurangnya sosialisasi yang menjangkau seluruh ormas yang ada." Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa kesadaran akan kekurangan sudah ada, namun belum diikuti dengan langkah perbaikan yang sistematis. Dari sisi

hasil kerja, Kesbangpol telah melaksanakan pendataan dan verifikasi ormas secara bertahap melalui aplikasi Meno Sidak Kanda, meskipun cakupannya masih sangat terbatas mengingat hanya 52 dari 161 ormas yang berhasil didaftarkan secara resmi.

Temuan produktivitas ini sejalan dengan Nugrahinni & Nurcahyanto (2023) yang menemukan produktivitas Kesbangpol belum optimal terutama pada SDM dan efisiensi operasional. Berbeda dengan Mirwanto (2022) yang menemukan efektivitas pegawai berpengaruh positif di konteks urban Jawa, di Mimika keterbatasan kompetensi dan inovasi SDM menjadi hambatan yang lebih besar akibat kompleksitas geografis dan multikulturalisme setempat. Hal ini memperkuat argumen Brinkerhoff & Brinkerhoff (2011) bahwa efektivitas kelembagaan sangat ditentukan oleh konteks lokal.

Tabel 4. Rekapitulasi Penilaian Kinerja Kesbangpol Kabupaten Mimika

NO	DIMENSI KINERJA	KONDISI SAAT INI	PENILAIAN
1	Produktivitas	Prosedur dijalankan; efisiensi sosialisasi rendah; pendataan bertahap via Meno Sidak Kanda	Cukup / Belum Optimal
2	Kualitas Layanan	Pelayanan cukup memuaskan; verifikasi lambat; pendampingan teknis minim	Cukup / Belum Optimal
3	Responsivitas	Responsif di kantor; terbatas di lapangan; aplikasi digital dimanfaatkan	Cukup
4	Responsibilitas	Kepatuhan SOP terjaga; sebagian program sosialisasi belum terlaksana	Cukup
5	Akuntabilitas	Laporan kepada pimpinan baik; akuntabilitas publik-substantif masih lemah	Cukup / Perlu Peningkatan

Sumber: Hasil wawancara dan observasi, diolah peneliti 2026

3.2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan mengacu pada kepuasan penerima layanan (Dwiyanto, 2021:50). Kesbangpol Mimika telah mengupayakan peningkatan layanan melalui sosialisasi aplikasi dan evaluasi data ormas. Ketua Ikatan Minang menyatakan: "Pelayanan sudah cukup membantu, tapi prosesnya sering lambat dan kami tidak tahu kapan verifikasi selesai." Pernyataan ini mencerminkan bahwa kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh output yang dihasilkan, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan publik dalam perumusannya.

Ketua Lembaga Adat Amungme-Kamoro mengakui Kesbangpol mampu memfasilitasi dialog dan bimbingan hukum, meski pelayanan administratif bagi lembaga adat masih lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan khusus komunitas adat. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan kualitas layanan antara ormas berbasis etnis-adat dengan ormas umum. Van Ryzin (2004) menyatakan bahwa kualitas layanan publik yang baik mensyaratkan responsivitas terhadap harapan warga yang beragam kondisi yang belum terpenuhi secara merata di Kesbangpol Mimika. Temuan ini mengimplikasikan perlunya diferensiasi layanan yang sensitif terhadap kebutuhan spesifik berbagai kategori ormas.

3.3. Responsivitas

Responsivitas menilai kemampuan merespons kebutuhan masyarakat (Dwiyanto, 2021:51). Analisis menunjukkan dualisme responsivitas yang kontras: responsivitas di tingkat kantor berjalan cukup baik melalui program pendaftaran dan pemberdayaan ormas via Meno Sidak Kanda, namun di lapangan,

keterbatasan SDM dan anggaran secara signifikan menghambat jangkauan pembinaan ke ormas-ormas di wilayah terpencil. Kondisi ini menghasilkan kesenjangan layanan yang serius antara ormas di wilayah perkotaan dengan ormas di pedalaman Mimika.

Fung (2006) menegaskan bahwa responsivitas pemerintah terhadap organisasi masyarakat sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan kondisi yang masih menjadi kelemahan utama Kesbangpol Mimika. Implikasinya, peningkatan responsivitas tidak cukup hanya dengan pengembangan platform digital seperti Meno Sidak Kanda, melainkan harus diiringi dengan penguatan kapasitas SDM lapangan yang mampu menjangkau seluruh wilayah kabupaten yang sangat luas dan beragam aksesibilitasnya.

3.4. Responsibilitas dan Akuntabilitas

Responsibilitas mencerminkan kepatuhan terhadap SOP (Dwiyanto, 2021:52). Seluruh aparatur Kesbangpol Mimika telah menjalankan tugas sesuai prosedur yang ditetapkan, menunjukkan internalisasi tata kerja birokrasi yang cukup baik. Namun kepatuhan prosedural ini belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam capaian substantif: beberapa program sosialisasi belum terlaksana karena belum semua ormas terdata. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kepatuhan terhadap proses (process compliance) dengan pencapaian hasil akhir yang diharapkan.

Akuntabilitas (Dwiyanto, 2021:53) dalam praktiknya di Kesbangpol Mimika lebih terfokus pada pertanggungjawaban keuangan kepada pimpinan daripada akuntabilitas kinerja substantif kepada publik. Brinkerhoff & Brinkerhoff (2011) mengingatkan bahwa di banyak negara berkembang, akuntabilitas lembaga publik cenderung bersifat upward (ke atas, kepada atasan) dibanding downward (ke bawah, kepada masyarakat) pola yang juga teridentifikasi dengan jelas dalam penelitian ini. Temuan ini menolak asumsi bahwa penerapan sistem informasi digital secara otomatis meningkatkan akuntabilitas publik, mengingat penggunaan aplikasi Meno Sidak Kanda tidak serta-merta meningkatkan akuntabilitas substantif Kesbangpol kepada ormas dan masyarakat.

3.5. Faktor Penghambat dan Upaya

Berdasarkan triangulasi data wawancara, observasi, dan dokumentasi, terdapat empat faktor penghambat utama kinerja Kesbangpol Kabupaten Mimika: (1) keterbatasan SDM dalam kompetensi teknis dan jumlah personel; (2) sarana dan prasarana yang belum memadai termasuk perangkat digital; (3) koordinasi antarinstansi yang masih lemah; dan (4) rendahnya kesadaran sebagian ormas terhadap pentingnya legalitas. Kondisi ini sesuai temuan Andrews et al. (2017) bahwa kapasitas kelembagaan merupakan determinan utama efektivitas lembaga pemerintah di negara berkembang.

Tabel 5. Faktor Penghambat dan Upaya Kesbangpol Kabupaten Mimika

NO	FAKTOR PENGHAMBAT	DAMPAK	UPAYA YANG DILAKUKAN
1	Keterbatasan SDM (kompetensi & jumlah)	Pembinaan tidak merata & lambat	Kerja sama mandiri; rencana pelatihan internal
2	Sarana & prasarana minim	Kualitas output pembinaan rendah	Optimalisasi aplikasi Meno Sidak Kanda
3	Koordinasi antarinstansi lemah	Program tidak sinergis & tumpang tindih	Forum komunikasi lintas OPD (dalam perencanaan)

4	Rendahnya kesadaran legalitas ormas	161 ormas terdata, hanya 52 terdaftar resmi	Sosialisasi berkala; pendampingan administrasi
5	Dualisme kepengurusan ormas	Konflik internal mengganggu stabilitas sosial	Mediasi dan verifikasi melalui Meno Sidak Kanda

Sumber: Hasil wawancara dan observasi, diolah peneliti 2026

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori kinerja organisasi publik, khususnya pada dimensi kontekstualisasi teori. Temuan bahwa kinerja Kesbangpol Mimika belum optimal pada seluruh lima dimensi Dwiyanto (2021) memperkuat argumen teoretis bahwa kerangka kinerja yang dikembangkan dalam konteks perkotaan perlu diadaptasi ketika diterapkan pada daerah dengan karakteristik geografis-sosiologis yang kompleks seperti Mimika. Rasidi dan Sadmoko (2019) menegaskan bahwa pengukuran kinerja instansi pemerintah tidak hanya berorientasi pada pencapaian output administratif, tetapi juga harus memperhatikan efektivitas pelaksanaan fungsi organisasi secara komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, meskipun Kesbangpol Kabupaten Mimika telah menjalankan berbagai prosedur pembinaan ormas sesuai ketentuan, capaian substantifnya masih belum optimal karena sebagian besar ormas belum terdaftar dan belum memperoleh pembinaan secara merata. Endang Try Setyasih (2019) profesionalisme pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menemukan bahwa keterbatasan kompetensi dan jumlah SDM menjadi faktor utama yang memengaruhi produktivitas, kualitas layanan, dan responsivitas Kesbangpol Kabupaten Mimika dalam melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan. Lusy Riadina Putri (2021) bahwa digitalisasi layanan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan apabila didukung oleh kesiapan pengguna, infrastruktur, dan kapasitas organisasi. Temuan tersebut relevan dengan penggunaan aplikasi Meno Sidak Kanda di Kabupaten Mimika yang telah membantu proses pendataan dan verifikasi ormas, namun belum mampu menghasilkan peningkatan kinerja yang optimal karena masih terdapat keterbatasan akses teknologi, kapasitas SDM, serta kesenjangan digital pada sebagian pengurus ormas di wilayah terpencil.

Berbeda dengan Gumelar (2023) yang menemukan Kesbangpol Sragen cukup efektif menjalankan fungsi fasilitator, penelitian ini menunjukkan bahwa konteks lokal khususnya kompleksitas geografis, multikulturalisme 34 suku, dan fenomena dualisme ormas secara signifikan membatasi kemampuan Kesbangpol Mimika menjalankan fungsi serupa. Ini sejalan dengan proposisi Brinkerhoff & Brinkerhoff (2011) bahwa efektivitas kelembagaan tidak bersifat universal melainkan sangat terikat konteks.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Pertama, fenomena dualisme kepengurusan ormas di Mimika berkontribusi pada pengembangan teori modal sosial Putnam (2000). Jika modal sosial dibangun melalui ormas yang kohesif dan fungsional, maka dualisme kepengurusan berpotensi menjadi penghancur modal sosial. Hal ini dikonfirmasi oleh data lapangan: Ketua Lembaga Adat Amungme-Kamoro menyatakan bahwa konflik kepengurusan internal menyebabkan kegiatan pembinaan sosial-budaya terhenti selama beberapa bulan.

Kedua, keberadaan lembaga adat sebagai kategori ormas dengan karakteristik khas memberikan kontribusi pada kajian pluralisme hukum dalam administrasi publik. Data wawancara mengungkapkan bahwa proses verifikasi legal formal sering berbenturan dengan prosedur adat internal yang memiliki otoritas tersendiri, mencerminkan tantangan nyata dalam implementasi kebijakan pembinaan ormas di daerah multikultur.

Ketiga, fenomena kesenjangan digital (digital divide) dalam implementasi Meno Sidak Kanda memberikan kontribusi empiris pada kajian e-government di daerah terpencil. Berdasarkan keterangan Ketua Binfora, sebagian besar pengurus ormas di wilayah pedalaman Mimika tidak memiliki akses internet yang memadai. Linders (2012) menyatakan bahwa transformasi dari e-government menuju we-government mensyaratkan kesiapan digital dari seluruh pemangku kepentingan kondisi yang belum terpenuhi di Mimika.

Keempat, komitmen dan dedikasi aparatur di tengah keterbatasan sumber daya merupakan temuan yang memiliki implikasi praktis. Staf bidang ormas kerap melakukan koordinasi di luar jam kerja dan menggunakan media sosial pribadi untuk menjangkau ormas yang sulit dihubungi secara formal. Andrews et al. (2017) menyatakan bahwa komitmen individu aparatur merupakan aset kapasitas yang tidak dapat diabaikan, namun komitmen individual yang tidak didukung sistem manajemen kinerja yang memadai akan menghasilkan capaian yang terbatas dan tidak berkelanjutan.

Kelima, hubungan kausalitas dua arah antara kinerja Kesbangpol dan kesadaran legalitas ormas merupakan kontribusi konseptual yang penting. Ormas yang tidak mendapat sosialisasi intensif cenderung tidak mendaftarkan diri, sementara rendahnya jumlah ormas terdaftar membuat Kesbangpol kesulitan menjustifikasi penambahan SDM dan anggaran. Fung (2006) menegaskan bahwa partisipasi organisasi masyarakat membutuhkan fasilitasi aktif pemerintah sebuah hubungan saling memengaruhi yang perlu direspons dengan kebijakan yang bersifat komprehensif dan simultan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam meningkatkan peran organisasi masyarakat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, telah dilaksanakan namun belum optimal pada kelima dimensi kinerja Dwiyanto (2021): produktivitas terkendala keterbatasan SDM dan sosialisasi; kualitas layanan belum memadai terutama bagi ormas berbasis adat; responsivitas kuat di kantor namun lemah di lapangan; responsibilitas terjaga secara prosedural tetapi belum substantif; dan akuntabilitas lebih berorientasi ke atas daripada kepada masyarakat. Hambatan utama meliputi keterbatasan SDM, sarana prasarana yang belum memadai, lemahnya koordinasi antarlembaga, rendahnya kesadaran ormas terhadap legalitas, serta dualisme kepengurusan ormas yang menjadi persoalan spesifik daerah.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori kinerja organisasi publik yang lebih kontekstualistis, mengusulkan kebutuhan adaptasi model Dwiyanto (2021) untuk daerah 3T dengan variabel konteks geografis-sosiologis. Secara praktis, Kesbangpol Mimika memerlukan peningkatan signifikan dalam kapasitas SDM, sistem informasi digital yang inklusif, dan kolaborasi multipihak guna memperkuat peran ormas sebagai mitra strategis pembangunan daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang relatif singkat (3 minggu) dan jumlah informan yang terbatas pada 5 orang, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan kehati-hatian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji model pembinaan ormas yang responsif terhadap kebutuhan daerah 3T dengan karakteristik multikultur, serta mengembangkan sistem informasi digital yang inklusif bagi ormas di wilayah dengan digital divide yang signifikan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Baharuddin Thahir, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing atas bimbingan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Organisasi Kemasyarakatan beserta seluruh aparatur Kesbangpol Kabupaten Mimika atas data dan kesempatan penelitian, serta kepada seluruh ketua ormas yang telah bersedia menjadi informan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2017). *Building state capability: Evidence, analysis, action*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198747482.001.0001

Brinkerhoff, D. W., & Brinkerhoff, J. M. (2011). Public–private partnerships: Perspectives on purposes, publicness, and good governance. *Public Administration and Development, 31*(1), 2–14. https://doi.org/10.1002/pad.584

Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik (Edisi ke-6). Gadjah Mada University Press.

Efyanti, Y. (2019). Peran Kesbangpol Linmas dalam pembinaan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 18*(2), 65–79. https://doi.org/10.32939/islamika.v18i02.311

Evita, S. R. (2025). Data organisasi kemasyarakatan Kabupaten Mimika 2024–2025 [Laporan internal]. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika.

Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review, 66*(Suppl. 1), 66–75. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x

Gumelar, R. (2023). Analisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sragen. Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal, 8(3), 101–115. https://doi.org/10.36355/jppl.v8i3.1245

Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration, 69*(1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x

Linders, D. (2012). From e-government to we-government: Defining a typology for citizen coproduction in the age of social media. Government Information Quarterly, 29(4), 446–454. https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.003

Mirwanto, M. (2022). Efektivitas kinerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 5(2), 78–92. https://doi.org/10.33701/jmp.v5i2.2187

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Nugrahinni, A., & Nurcahyanto, H. (2023). Analisis kinerja organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 12(1), 55–72. https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i1.38541

Noor Ihsan, H. (2022). Pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan ormas terhadap manajemen pembinaan ormas untuk mewujudkan efektivitas pencapaian program pembinaan ormas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, *16*(1), 17–25. https://doi.org/10.52434/jp.v16i01.103

Peraturan Bupati Mimika Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika. Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2015 Nomor 33.

Putri, L. R. (2021). *Inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Smart Campus Data Base (SCDB) di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, 3(2). https://doi.org/10.33701/jtkp.v3i2.2308

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster.

Rasidi, R., & Sadmoko, R. (2019). *Penerapan konsep balanced scorecard dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 45(2), 189–202. https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i2.689

Setyasih, E. T. (2019). *Creation of professionalism in public services by developing the competence of state civil apparatuses*. International Journal of Science and Society, 1(4). https://doi.org/10.54783/ijsoc.v1i4.630

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-3). Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 116. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38745/uu-no-17-tahun-2013

Van Ryzin, G. G. (2004). Expectations, performance, and citizen satisfaction with urban services. *Journal of Policy Analysis and Management*, *23*(3), 433–448. https://doi.org/10.1002/pam.20020